



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. BAHRI SULI, MM

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. JAYADI NAS, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

SEKRETARIS DAERAH

Dr. JAYADI NAS, S.Sos, M.Si

Drs. H. BAHRI SULI, MM

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah	Persentase Rata – Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup SETDA	100 %

Program Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.155.880.197,00	32.103.020.197,00
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33.890.836.900,00	44.546.696.900,00
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.642.688.887,00	2.884.898.887,00
Jumlah		66.689.405.984,00	79.534.615.984,00

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR

SEKRETARIS DAERAH


Dr. JAYADI NAS, S.Sos, M.Si


Drs. H. BAHRI SULI, MM

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan merupakan suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan Good Governance yang diselenggarakan melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik dari sisi kelembagaan, prosedur maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan akan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Melayani maka misi Kabupaten Luwu Timur.menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik dapat terwujud. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Rata- Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup SETDA	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian perbaikan tata Kelola pemerintahan yang baik bersih dan melayani	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah /Jumlah unit kerja pada Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata – Rata Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup SETDA	100 %	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BAHRI SULI, MM

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Drs. H. BAHRI SULI, MM

NIP. 19660620 198603 1 007

AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM

Nip. 19800629 199810 2 001

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penyelenggaraan Lini koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %

Program Pendukung Sasaran Kinerja : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pihak Kedua

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BAHRI SULI, MM

NIP. 19660620 198603 1 007

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM

Nip. 19800629 199810 2 001

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan lini koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Kualitas dan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan lini koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No .	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja Setiap Perangkat Daerah meningkat jika realisasi kinerja mencapai atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya	Jumlah Capaian Kinerja Lini koordinasi Lingkup SETDA /Jumlah Unit Kerja Lingkup SETDA x 100	Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesra.

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Capaian Kinerja Kinerja Lini Koordinasi Lingkup SETDA dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MUH. REZA, A.W, S.STP, MA

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM

Nip. 19800629 199810 2 001

ANDI MUH. REZA.A.W, S.STP.MA

Nip. 19851006 200412 1 003

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,0051

Program/ Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	587.085.000,00	569.085.000,00
1.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	485.279.000,00	469.349.000,00
1.2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	101.806.000,00	99.736.000,00

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN



AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM
Nip. 19800629 199810 2 001

ANDI MUH. REZA.A.W, S.STP.MA
Nip. 19851006 200412 1 003

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai LPPD	untuk menggambarkan capaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah setiap Tahun anggaran	Bagian Pemerintahan, Perangkat Daerah

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai LPPD	3,0051	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah setiap Tahun anggaran



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZY DAENG PAREBBA, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM

Nip. 19800629 199810 2 001

FAUZY DAENG PAREBBA, SE

Nip. 19701009 200902 1 001

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %

Program/ kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	32.407.310.400,00	43.136.850.000,00
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	32.407.310.400,00	43.136.850.000,00

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT



AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM
Nip. 19800629 199810 2 001



FAUZY DAENG PAREBBA, SE
Nip. 19701009 200902 1 001

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan	Kebijakan Kesejahteraan rakyat untuk menggambarkan pelaksanaan capaian kinerja bagian kesejahteraan rakyat	Jumlah Kebijakan yang difasilitasi/ Jumlah target kebijakan yang difasilitasi x 100	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Jumlah Kebijakan yang difasilitasi/ Jumlah target kebijakan yang difasilitasi x 100



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YERISLIN WUALA, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AINI ENDIS ANRIKA, S,STP, MM

Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA BAGIAN HUKUM

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP., M.M.
NIP. 19800629 199810 2 001

YERISLIN WUALA, S.H.
NIP. 19761213 200604 2 009

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum	Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	80

Program/ kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	896.441.500,00	840.761.500,00
1.1	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	896.441.500,00	840.761.500,00

Pihak Kedua,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP., M.M.
NIP. 19800629 199810 2 001

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN HUKUM



YERISLIN WUALA, S.H.
NIP. 19761213 200604 2 009

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi hukum merupakan kondisi dimana pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum terlaksana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks Reformasi Hukum (IRH) ditetapkan sebagai indikator kinerja Bagian Hukum untuk mendukung penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan capaian kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setiap tahun	Bagian Hukum

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	80	IRH adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional yang terdiri dari 4 variabel: 1. Tingkat koordinasi harmonisasi; 2. Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan; 3. Kualitas Re-regulasi atau deregulasi; dan 4. Pengelolaan JDIH. Penetapan target IRH ditingkatkan dari capaian tahun 2023 sebesar 76,39 menjadi 80 kategori BB Predikat Baik pada target tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASDIN, AP, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BAHRI SULI, MM

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH

Pihak Pertama,

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Drs. H. BAHRI SULI, MM
NIP.19660620 198603 1 007

MASDIN, AP, M.Si
Nip. 19730315 199311 1 001

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Lini Koordinasi Perekonomian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini Koordinasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100 %

Program Pendukung Sasaran Kinerja : Program Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BAHRI SULI, MM

NIP. 19660620 198603 1 007

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



MASDIN, AP, M.Si

Nip. 19730315 199311 1 001

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah lini koordinasi Perekonomian dan pelaksanaan pembangunan daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Kualitas dan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah lini koordinasi Perekonomian dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini Koordinasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Kinerja Setiap Perangkat Daerah meningkat jika realisasi kinerja mencapai atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya	Jumlah Capaian Kinerja Lini koordinasi Lingkup SETDA /Jumlah Unit Kerja Lingkup SETDA x 100	Bagian Perekonomian dan Admininstrasi Pembangunan SETDA, Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA.

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini Koordinasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100 %	Capaian Kinerja Kinerja Lini Koordinasi Lingkup SETDA dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I KETUT RIAWAN. B, S.IP

Jabatan : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDIN, AP, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MASDIN, AP, M.Si

Nip. 19730315 199311 1 001

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

I KETUT RIAWAN. B, S.IP

Nip. 19880221 200701 1 001

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Perekonomian dan administrasi Pembangunan	Persentase Pengendalian Inflasi daerah	100 %
		Persentase Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	100%

Program/ Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	896.441.500,00	840.761.500,00
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	553.164.100,00	521.424.100,00
1.2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	112.218.640,00	150.428.840,00
1.3	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	129.800.300,00	129.800.300,00

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


MASDIN, AP, M.Si
 Nip. 19730315 199311 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


I KETUT RIWAWAN, B.S.IP
 Nip. 19880221 200701 1 001

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Perekonomian dan administrasi Pembangunan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Perekonomian dan administrasi Pembangunan. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Keputusan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Pengendalian Inflasi daerah	Pengendalian Inflasi daerah dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	Capaian pengendalian Inflasi daerah yang dilaksanakan/ Target Pengendalian Inflasi daerah selama 1 (satu) Tahun x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
2.	Persentase Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah	Capaian kebijakan perekonomian dan adm. Pembangunan yang dihasilkan/ target Kebijakan perekonomian dan adm. Pembangunan selama 1 (satu) Tahun x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pengendalian Inflasi daerah	100%	Capaian pengendalian Inflasi daerah yang dilaksanakan/ Target Pengendalian Inflasi daerah selama 1 (satu) Tahun x 100
Persentase Kebijakan perekonomian dan administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	100%	Capaian kebijakan perekonomian dan adm. Pembangunan yang dihasilkan/ target Kebijakan perekonomian dan adm. Pembangunan selama 1 (satu) Tahun x 100



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EFY SYAHRIANI, ST, M.Si

Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDIN, AP, M.Si

Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG /JASA


MASDIN, AP, M.Si

Nip. 19730315 199311 1 001


EFY SYAHRIANI, ST, M.Si

Nip. 19750817 200604 2 008

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,00

Program/ Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.884.245.847,00	2.083.245.847,00
1.1	Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	1.884.245.847,00	2.083.245.847,00

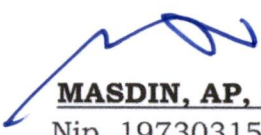
Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG /JASA



MASDIN, AP, M.Si

Nip. 19730315 199311 1 001



EFY SYAHRIANI, ST, M.Si

Nip. 19750817 200604 2 008

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kondisi dimana tercapainya suatu indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam Tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi pengadaan. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Capaian Kinerja Setiap Nilai indeks tata Kelola pengadaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena merupakan Bagian dari Penilaian dari Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Tata kelola Pengadaan selama 1 (satu) Tahun	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,00	Nilai Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP) selama 1 (satu) Tahun



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. NURSIH HARIANI

Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. BAHRI SULI, MM

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH

Drs. BAHRI SULI, MM

NIP. 19660620 198603 1 007

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Ir. NURSIH HARIANI

Nip. 19680610 199403 2 014

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Lini Koordinasi Penyelenggaraan administrasi Umum dan Akuntabilitas	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini Koordinasi Lingkup SETDA	100 %

Program Pendukung Sasaran Kinerja : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH



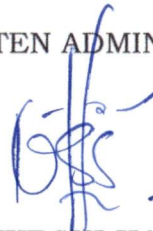
Drs. H. BAHRI SULI, MM

NIP. 19660620 198603 1 007

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



Ir. NURSIH HARIANI

Nip. 19680610 199403 2 014

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah lini koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Akuntabilitas.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Kualitas dan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah lini koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Akuntabilitas. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini Koordinasi Lingkup SETDA	Kinerja Setiap Perangkat Daerah meningkat jika realisasi kinerja mencapai atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya	Jumlah Capaian Kinerja Lini koordinasi Lingkup SETDA /Jumlah Unit Kerja Lingkup SETDA x 100	Bagian Umum SETDA, Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA, Bagian Organisasi SETDA, Bagian Prokopim SETDA.

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Lini Koordinasi Lingkup SETDA	100 %	Capaian Kinerja Kinerja Lini Koordinasi Lingkup SETDA dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIZKI ALAMSYAH, S.STP

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. NURSIH HARIANI

Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MALILI, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Ir. NURSIH HARIANI

Nip. 19680610 199403 2 014

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

MUHAMMAD RIZKI ALAMSYAH, S.STP

Nip. 19870508 200602 1 002

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kualitas SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	70,85

Program/Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan,	13.225.673.139,00	12.792.526.651
1.1	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi	183.190.500,00	182.796.500,00
1.2	Kuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi	12.904.649.439,00	12.485.986.951,00
1.3	Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi	108.533.200,00	91.773.200,00
1.4	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	29.300.000,00	31.970.000,00

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

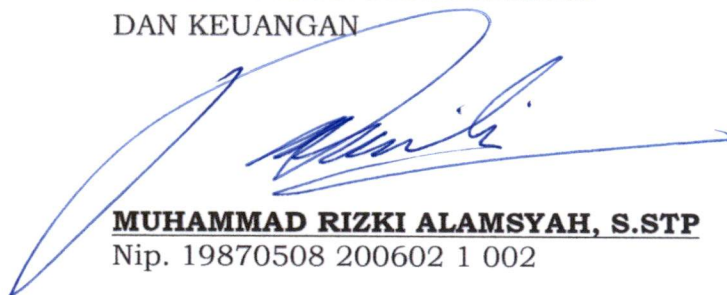


Ir. NURSIH HARIANI

Nip. 19680610 199403 2 014

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN



MUHAMMAD RIZKI ALAMSYAH, S.STP

Nip. 19870508 200602 1 002

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatkatnya Kualitas SAKIP Sekretariat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Kualitas SAKIP Sekretariat Daerah merupakan kondisi dimana Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja Bagian perencanaan dan keuangan untuk mendukung penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Sekretariat Daerah yang dikeluarkan oleh tim evaluator dari Inspektorat Kabupaten	Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Prokopim

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	70,85	Nilai Sakip Sekretariat Daerah Merupakan hasil Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,yang terdiri dari 4 Komponen yakni 1. Perencanaan kinerja dgn Bobot 30; 2. Pengukuran Kinerja dgn Bobot 30; 3. Pelaporan Kinerja dgn Bobot 15; 4. Evaluasi AKIP dgn Bobot 25.



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDAYANI ZAKARIA, SE

Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. NURSIH HARIANI

Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN UMUM

Ir. NURSIH HARIANI

Nip. 19680610 199403 2 014

WINDAYANI ZAKARIA, SE

Nip. 19780206 200312 2 008

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Persentase layanan Administrasi Perkantoran yang memadai	100 %
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90 %
		Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan	100%

Program/Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.526.537.258,00	16.903.404.446,00
1.1	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	318.208.575,00	379.758.575,00
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.073.344.605,00	3.756.989.005,00
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.515.250.000,00	2.216.417.788,00
1.4	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.882.658.684,00	1.809.858.684,00
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.598.395.000,00	2.648.995.000,00
1.6	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.363.580.394,00	4.323.582.394,00

1.7 Kegiatan Fasilitas
Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

1.775.100.000,00

1.767.800.000,00

Pihak Kedua,

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



Ir. NURSIH HARIANI

Nip. 19680610 199403 2 014

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM



WINDAYANI ZAKARIA, SE

Nip. 19780206 200312 2 008

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan layanan administrasi kepegawaian, penyediaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan. sehingga pelaksanaan urusan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Dasar hukum dalam Pencapaian Kinerja antara lain sesuai undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020 tentang kedudukan keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase layanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Persentase layanan Administrasi Perkantoran yang memadai ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menggambarkan capaian Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan/Jumlah Layanan yang ditetapkan x 100	Bagian umum
	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi	Jumlah Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan BMD yang dilaksanakan/Jumlah BMD yang diadakan dalam dipelihara x 100	Bgaian Umum
	Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan	Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas dan wewenang.	Jumlah Kebutuhan Rumah tangga Pimpinan yang dilaksanakan / Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan x 100	Bagian Umum

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase layanan Administrasi Perkantoran yang memadai	100 %	Layanan administrasi perkantoran merupakan suatu Tindakan dalam penanganan urusan kepegawaian, Jasa Komunikasi dan Jasa Pelayanan Umum
Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	90 %	Barang Milik Daerah merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan wewenang dalam mencapai tujuan organisasi.
Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan	100 %	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyediaan pemenuhan kebutuhan rumah tangga pimpinan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pimpinan



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ANDI ASMAH SARI, MM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. NURSIH HARIANI

Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Ir. NURSIH HARIANI

Hj. ANDI ASMAH SARI, MM

Nip. 19680610 199403 2 014

Nip. 19740904 200003 2 004

SEKRETARIAT DAERAH
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Bobot Komponen Pelaporan Kinerja	12,15
		Persentase Implementasi RB General dan RB Tematik	68
		Nilai Evaluasi Kelembagaan	69
		Indeks Pelayanan Publik	2,45
		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	85
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,01

Program/Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.775.100.000,00	1.767.800.000,00
1.1	Kegiatan Penataan Organisasi	1.775.100.000,00	1.767.800.000,00

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

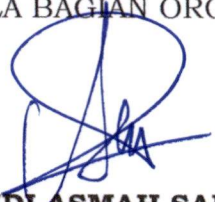
Pihak Pertama,

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN ORGANISASI


Ir. NURSIH HARIANI

Nip. 19680610 199403 2 014


Hj. ANDI ASMAH SARI, MM

Nip. 19740904 200003 2 004

SEKRETARIAT DAERAH
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Uraian Sasaran

Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merupakan kondisi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran yang berorientasi output dan outcome.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 6 indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Nilai Bobot Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai pada komponen ini merupakan hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah setiap akhir tahun berdasarkan perjanjian kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah kinerja (LAKIP) yang berisi gambaran secara menyeluruh tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap pengukuran hasil capaian kinerja yang dilengkapi dengan uraian penjelasan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian berdasarkan indikator kinerja, formulasi dengan penggunaan anggaran mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi output dan outcome.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kementerian PANRB
2.	Persentase Implementasi RB General dan RB Tematik	Merupakan gambaran capaian implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah setiap tahunnya dalam upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRBM

		penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing untuk pelayanan publik yang lebih baik.		
3.	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Merupakan hasil dari proses evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan terhadap suatu organisasi yang menjadi dasar untuk menata organisasi, meningkatkan efisiensi dan menciptakan kelembagaan yang efektif	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB
4.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik terhadap penyelenggara pelayanan publik yang langsung kemasyarakat yang selanjutnya dari hasil tersebut menjadi pedoman/tolak ukur mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang berkualitas	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB
5.	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengidentifikasi kompetensi penyelenggara pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan dan pengaduan yang memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan dan akuntabilitas	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kementerian PANRB
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Merupakan hasil penilaian untuk mengetahui tingkat implemenfasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perangkat daerah secara internal	Laporan hasil Evaluasi AKIP Internal	Inspektorat Kabupaten

Target Indikator

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Bobot Komponen Pelaporan Kinerja	12,15	Indikator ini merupakan hasil perbaikan/penyempurnaan dari evaluasi SAKIP 2024. Adapun target yang ditetapkan merujuk pada hasil capaian nilai pelaporan kinerja tahun 2023
Persentase Implementasi RB General dan RB Tematik	68	Target ini merupakan akumulasi dari nilai RB General dan RB Tematik dari beberapa sub komponen indikator penilaian berdasarkan hasil capaian nilai RB Tahun 2023
Nilai Evaluasi Kelembagaan	69	Target nilai evaluasi kelembagaan ditetapkan berdasarkan hasil capaian tahun 2023
Indeks Pelayanan Publik	2,45	Berdasarkan hasil capaian Indeks Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB tahun 2023 dengan skor 2,35, maka untuk tahun 2024 targetnya dinaikkan menjadi 2,45.
Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	85	Capaian kinerja pada indikator ini sudah baik dengan nilai 83,84, sehingga untuk tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 85.
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil penilaian dari Inspektorat, sehingga untuk target seluruh PD diambil nilai rata2 berdasarkan nilai AKIP setiap PD yang diharapkan seluruh PD untuk tahun 2024 mengalami peningkatan.